

**MANAJEMEN MITIGASI BENCANA KEKERINGAN OLEH BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

¹ Maria Yuniarti Lavenia Rey; ² Ida Yunari Ristiani

¹ NPP. 31.0792

¹ *Asdaf Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur*
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: ¹ 31.0792@praja.ipdn.ac.id ; ² Idayunarir@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The drought disaster that occurred in Sikka Regency was caused by geographical conditions so that it affected natural conditions in the form of a long dry season. This situation causes the supply of clean water to decrease due to minimal rainfall. Even though this situation occurs every year, people still experience a lack of clean water so that drought management is still ineffective.* **Objective:** *This research aims to identify and analyze drought disaster mitigation management, external and internal obstacles that arise, and efforts to overcome obstacles.* **Methodology:** *The research method is descriptive qualitative with an inductive approach, and secondary data sources. Data collection techniques through interviews and documentation. The data analysis techniques are through data reduction, data presentation, and drawing conclusions.* **Result/Findings:** *The research results show that the management of drought disaster mitigation through disaster outreach and distribution of clean water was analyzed using management theory according to G. R. Terry. Management consists of planning activities which include financing, infrastructure used, and implementation time, organizing outreach by the prevention and preparedness sector while distributing clean water by the emergency and logistics sector, actuating outreach activities with priority to communities living in areas with high potential for drought, Meanwhile, the distribution of clean water is prioritized for communities with the highest incidence index in previous years, and controlling is carried out passively without involving the community as users. Inhibiting factors consist of internal obstacles, namely the lack of resources from within the Sikka Regency BPBD, while external obstacles come from conditions in the community where mitigation activities are carried out.* **Conclusion:** *The research shows that mitigation management which consists of planning, organizing, actuating and controlling is quite good but is hampered by the monitoring stage not being implemented optimally so that drought disaster mitigation management is not yet effective. Meanwhile, to overcome these obstacles, BPBD is trying to make alternative plans by collaborating with the community and other OPDs within the Sikka Regency government.*

Keywords : *Mitigation Management, Drought, Regional Disaster Management Agency.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Bencana kekeringan yang terjadi di Kabupaten Sikka disebabkan oleh kondisi geografis sehingga berpengaruh pada keadaan alam berupa musim kemarau yang panjang. Keadaan tersebut menyebabkan persediaan air bersih semakin berkurang karena curah hujan yang minim. Walaupun keadaan ini berlangsung setiap tahun masyarakat masih mengalami kekurangan air bersih sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana kekeringan masih belum efektif. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis manajemen mitigasi bencana kekeringan, hambatan eksternal dan hambatan internal yang muncul, dan upaya mengatasi hambatan. **Metodologi:** Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen mitigasi bencana kekeringan melalui sosialisasi bencana dan pembagian air bersih dianalisis menggunakan teori manajemen menurut G. R. Terry. Manajemen terdiri dari perencanaan kegiatan yang mencakup pembiayaan, sarana prasarana yang digunakan, dan waktu pelaksanaan, pengorganisasian sosialisasi oleh bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sedangkan pembagian air bersih oleh bidang kedaruratan dan logistik, penggerakan kegiatan sosialisasi dengan prioritas kepada masyarakat yang tinggal di daerah berpotensi tinggi kekeringan, sedangkan pembagian air bersih diprioritaskan bagi masyarakat dengan indeks kejadian paling banyak pada tahun-tahun sebelumnya, dan pengawasan dilaksanakan secara pasif tanpa melibatkan masyarakat sebagai *user*. Faktor penghambat terdiri dari hambatan internal yaitu kurangnya sumber daya dari dalam BPBD Kabupaten Sikka sedangkan hambatan eksternal berasal dari kondisi pada masyarakat tempat kegiatan mitigasi dilaksanakan. **Kesimpulan:** Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam manajemen mitigasi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sudah cukup baik namun terkendala pada tahap pengawasan tidak dilaksanakan dengan optimal sehingga manajemen mitigasi bencana kekeringan belum efektif. Sedangkan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut BPBD berupaya membuat rencana alternatif dengan cara kolaborasi bersama masyarakat dan OPD lain dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Sikka.

Kata Kunci : Manajemen Mitigasi, Kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fungsi perlindungan kepada masyarakat merupakan seluruh upaya yang diselenggarakan pemerintah untuk menjaga dan mengamankan masyarakat dari segala bentuk ancaman fisik atau non-fisik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah melalui seluruh lembaga negara yang berada di pusat sampai daerah berkewajiban melaksanakan perlindungan kepada masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing. Perlindungan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara langsung melalui kegiatan nyata di lapangan, tidak langsung dengan membentuk regulasi atau kebijakan (Eva dan Sutiyo, 2023).

Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023 bencana kekeringan merupakan bencana dengan indeks penduduk terpapar dan ancaman yang tinggi. Kekeringan dipengaruhi oleh musim kemarau yang berlangsung lebih lama daripada musim hujan. Musim kemarau berlangsung selama 7 bulan yang

terjadi dari bulan April sampai Oktober sedangkan musim hujan terjadi dari bulan November sampai Maret. Musim hujan dan musim kemarau ini terjadi berdasarkan perubahan angin muson. Angin muson Asia terjadi pada bulan Desember sampai Februari membawa musim hujan sedangkan angin muson Australia terjadi pada bulan Juni sampai Agustus membawa musim kemarau (Faqih et al., 2015). Keadaan ini juga didukung oleh kondisi geografis Kabupaten Sikka yang masuk kedalam daerah monsoon. *Monsoon* merupakan fenomena alam dimana sering terjadi perubahan iklim secara ekstrem karena perubahan tekanan udara dari daratan yang kemudian secara tidak langsung menyebabkan naiknya titik didih dari lautan atau *jet stream effect*. *Jet stream effect* kemudian memberikan daratan dengan hawa panas secara langsung yang mengikutinya. Hawa panas dan kekuatan angin ini membuat daerah yang pada mulanya mengandung air menjadi kering. Imbas paling parah terjadi pada musim kemarau yang secara alami sudah kering dan panas tetapi tetap mendapat fenomena *monsoon* tersebut.

Kabupaten Sikka mengalami musim kemarau yang lebih panjang yaitu selama 7 bulan sedangkan musim hujan terjadi selama 5 bulan dalam setahun. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sikka pada tahun 2020-2022 bulan Juli sampai dengan September yang mana merupakan puncak musim kemarau curah hujan < 27mm. Dengan curah hujan yang minim cadangan air masyarakat pada saat kemarau menjadi berkurang. Keadaan tersebut bukan hanya terjadi satu atau dua tahun kebelakang tetapi sudah bertahun-tahun lamanya. Air bersih yang tersedia menjadi sangat sedikit karena cadangan yang terbatas sedangkan musim kemarau belum berakhir. Kejadian ini bukan hanya berdampak bagi kebutuhan air bersih harian masyarakat tetapi juga pada sektor pertanian dan perkebunan yang akhirnya tidak berjalan dengan baik karena kekurangan air untuk kegiatan tersebut. Oleh karena keadaan alam seperti ini, pemerintah Kabupaten Sikka melalui BPBD Kabupaten Sikka melaksanakan kegiatan-kegiatan mitigasi untuk membantu dan mengedukasi Masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana kekeringan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Sikka melalui BPBD Kabupaten Sikka bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana kekeringan tersebut. Apa saja kegiatan dan bagaimana pelaksanaan mitigasi bencana kekeringan oleh BPBD Kabupaten Sikka sehingga dampak yang dirasakan masyarakat tetap sama dan tidak ada perubahan sedangkan bencana ini merupakan *slow on set disaster* yang terjadi secara perlahan-lahann dari waktu ke waktu. Kasus masyarakat yang terdampak kekeringan pada tahun 2019 sampai 2023 mengalami kenaikan karena musim kemarau 5 tahun kebelakang semakin kering dan panjang sehingga wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terdampak kekeringan pada akhirnya juga ikut merasakan dampaknya. Walaupun efek dari bencana kekeringan semakin meluas, kegiatan mitigasi seakan dilaksanakan untuk menanggulangi bencana dengan jangka waktu yang sangat pendek dan pada beberapa wilayah saja. Hal ini karena pada daerah-daerah yang lebih terpencil masyarakat mencari sendiri sumber air dalam pemenuhan kebutuhannya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai perbandingan kerangka kerja dan hasil dari penelitian yang akan dilakukan. Selain sebagai perbandingan, penelitian terdahulu membantu mengetahui persamaan dan perbedaan dari penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini beracuan pada penelitian terdahulu yang membahas

penanggulangan bencana kekeringan dengan fokus pembahasan bagaimana mencegah kekeringan pada tahap pra bencana. Pertama (Nurillah et al., 2022) *Manajemen Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Cilegon Di Kecamatan Ciwandan*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa mitigasi dilaksanakan dengan pemantauan mitigasi di daerah terdampak yang diklasifikasikan dengan adanya peta lokasi bencana serta sosialisasi, penyuluhan dan pendidikan bencana pada masyarakat. Penelitian kedua (Suryapuspita et al., 2022) *Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Kekeringan Di Kabupaten Bojonegoro*. Hasil penelitian menunjukkan Dalam penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Bojonegoro telah membangun beberapa proyek yang berguna untuk penyediaan air bagi masyarakat meliputi waduk, sumur bor, fasilitas pengelolaan air, geo membran, toren air, dan jaringan pipa air bersih juga melakukan mitigasi kepada masyarakat langsung melalui sosialisasi penanganan kekeringan dan mempromosikan konservasi air. Untuk jaringan pipa air bersih masih dalam tahap pembangunan. Penelitian ketiga tentang *Manajemen Mitigasi Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Menanggulangi Bencana Kekeringan Di Kabupaten Boyolali* (Septiarum et al., 2023). Hasil penelitian adalah Manajemen Mitigasi oleh BPBD belum maksimal hal ini terjadi karena fungsi manajemen penggerakan bencana tidak berjalan dengan baik sehingga program-program yang sudah tidak berjalan yang kemudian mengakibatkan semakin meningkat daerah terdampak kekeringan sedangkan hambatan yang terjadi antara lain kurang evaluasi pada tahap tanggap darurat, kelalaian penanggung jawab pada sistem tanggap darurat, dan komunikasi dan peringatan dini yang kurang memadai. Penelitian keempat (Fatah et al, 2023) *Peran LSM Dalam Penanggulangan Kekeringan Dan Implikasinya Bagi Ketahanan Wilayah Di Kapanewon Nglipar Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pada Yayasan Wahana Mandiri Indonesia)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Wash Program (Fresh Water Installation Conduction and Wash Education)* merupakan proyek yang dilakukan oleh Yayasan Wahana Mandiri Indonesia. Proyek ini merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan dan pendampingan kepada masyarakat yang disertai dengan bantuan fisik berupa pengadaan air bersih dan pendidikan terkait pola dan gaya hidup bersih. Penelitian kelima (Firdaus, 2023) tentang *Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Alam Kekeringan Di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur*. Hasil penelitian adalah BPBD berfokus pada program kesiapsiagaan melalui program Desa Tangguh Bencana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana walaupun pelaksanaan belum menyeluruh. Kebijakan BPBD melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bencana kekeringan cenderung jangka pendek seperti pendistribusian bantuan air bersih, pembangunan dan pemeliharaan sistem irigasi kepada masyarakat. Penelitian keenam (Amanda, 2023) tentang *Rencana Mitigasi Dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro Untuk Menangani Bencana Kekeringan*. Hasil penelitian adalah untuk menanggulangi bencana kekeringan BPBD menyiapkan bantuan air bersih dan pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana serta mitigasi struktural dengan membangun water tower dan sumur bor. Penelitian ketujuh (Neritarani, 2019) tentang *Identifikasi Dan Strategi Mitigasi Bencana Kekeringan Potensial Di Kabupaten Semarang*. Hasil penelitian adalah manajemen bencana yang tepat untuk bencana kekeringan potensial di Kabupaten Semarang adalah program pengendalian dan pelestarian sumberdaya air dengan pemanfaatan air secara efektif dan efisien, serta penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya air dan kondisi fisik wilayahnya. Penelitian kedelapan (Dwilucky dan Wahyudi, 2024) tentang *Penanggulangan Bencana Kekeringan di Kabupaten Bojonegoro Dalam Perspektif Good Governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro

telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dari 3 aktor Good Governance yang telah berperan aktif dalam upaya penanggulangan bencana kekeringan pada fase pra bencana dan pada saat terjadi bencana tetapi pada fase pra bencana selama ini hanya BPBD yang sudah berperan aktif sedangkan sektor swasta dan masyarakat sipil masih belum berperan aktif.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat pada teori manajemen mitigasi yang berfokus pada pengelolaan kegiatan sosialisasi dan penyaluran air bersih di Kabupaten Sikka serta dengan mengidentifikasi hambatan yang diklasifikasikan menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal serta upaya mengatasi hambatan yang muncul.

1.5 Tujuan

Penelitian bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis hal-hal berikut. Pertama, langkah-langkah yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Sikka dalam manajemen mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Sikka. Kedua, untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang terjadi dalam manajemen mitigasi bencana kekeringan. Ketiga, bagaimana upaya BPBD Kabupaten Sikka mengatasi hambatan yang muncul.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Menurut Sugiyono (2022:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang memotret keadaan alamiah dan kondisi alamiah suatu masalah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Untuk memperoleh data secara aktual dari lapangan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan dengan sumber informan yang terdiri dari Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sikka dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sikka. Dokumentasi yang dikumpulkan berupa foto atau gambar saat pelaksanaan wawancara dan dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan, laporan kinerja tahunan BPBD Kabupaten Sikka, arsip BPBD, dan data pendukung lain yang berkaitan dengan kegiatan mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Sikka. Adapun analisis data menggunakan teori analisis data oleh Model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2022:246-253) dengan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini peneliti membahas bagaimana manajemen mitigasi bencana kekeringan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Sikka menggunakan teori Manajemen G.R. Terry yang terdiri dari 4 tahapan yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.

3.1 Manajemen Mitigasi Bencana Kekeringan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

a. Perencanaan (*Planning*)

Mitigasi bencana kekeringan yang dilaksanakan BPBD adalah mitigasi non-struktural dengan kegiatan sosialisasi bencana kekeringan dan pembagian air bersih kepada Masyarakat. Sosialisasi

dilaksanakan berdasarkan permintaan masyarakat karena operasional pembiayaan pada tempat kegiatan dibebankan kepada masyarakat sedangkan dana yang dikeluarkan oleh BPBD untuk biaya perjalanan dari kantor BPBD kepada tempat pelaksanaan kegiatan. Pembagian air bersih diprioritaskan kepada daerah yang mengalami kekeringan paling luas masyarakat terdampaknya dengan pengukuran menggunakan indeks kejadian bencana kekeringan paling sering terjadi dan dipertimbangkan berdasarkan skala prioritas yang diukur dengan jumlah keluarga terdampak paling banyak pada tahun-tahun sebelumnya.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh seluruh personal BPBD Kabupaten Sikka dengan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai koordinator dan penanggung jawab kegiatan sedangkan pembagian air bersih diselenggarakan oleh bidang kedaruratan dan logistik.

c. Penggerakan (*Actuating*)

Sebelum terjun langsung ke masyarakat BPBD melaksanakan rapat untuk memberikan arahan dan alur cara kerja yang akan dilaksanakan oleh personil ketika bertugas di lapangan dengan tujuan persiapan dari perencanaan yang telah ditetapkan agar kegiatan berjalan berdasarkan tujuan yang direncanakan sebelumnya. Sosialisasi dilaksanakan melalui seminar pemberian informasi kepada masyarakat dengan materi serta cara penyampaian yang berbeda sesuai dengan latar belakang masyarakat seperti lingkungan, rentang usia, dan pekerjaan. Pada pelaksanaan kegiatan pembiayaan untuk air bersih mengalami keterbatasan sehingga BPBD bekerjasama dengan masyarakat untuk menyediakan iuran tambahan agar air bersih tetap tersedia.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pada tahap monitoring dan pemantauan tidak ada kegiatan lebih lanjut seperti melaksanakan survei atau simulasi untuk mengukur pengetahuan masyarakat. Sedangkan monitoring bantuan air bersih dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan pada daerah-daerah yang sebelumnya diberikan bantuan air bersih. BPBD Kabupaten Sikka melihat penggunaan air dan pasokan air dengan cara menunggu laporan dari masyarakat tanpa turun langsung ke lokasi.

3.2 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kekeringan di Kabupaten Sikka

a. Hambatan Internal.

Anggaran menjadi hambatan paling besar dalam kegiatan ini. Anggaran yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD tidak sanggup membiayai seluruh kebutuhan dalam kegiatan sosialisasi dan pembagian air bersih. Penulis juga menemukan bahwa sarana prasarana yang layak digunakan untuk penyaluran air bersih hanya berjumlah 2 (dua) mobil tangki air sedangkan dalam satu waktu pembagian air bersih harus dilaksanakan di beberapa titik. Sedangkan pada kegiatan sosialisasi hambatan yang muncul adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam penyampaian materi kepada masyarakat namun kegiatan harus segera dilaksanakan di beberapa tempat sekaligus.

b. Hambatan Eksternal.

Faktor eksternal yang pertama adalah keadaan topografi tempat tinggal warga khususnya masyarakat desa yang tidak memungkinkan kendaraan berukuran besar seperti mobil tangki air menjangkau pemukiman karena jalan yang kecil dan medan yang curam. Selain keadaan geografis, kurangnya fasilitas masyarakat pada saat penyaluran air bersih dimana Ketersediaan fasilitas di pemukiman khususnya tempat penampungan air masyarakat desa sangat sedikit dan tidak siap untuk menerima bantuan air tersebut. Persiapan penyaluran air di masyarakat kurang efektif dan memerlukan lebih banyak bak penampungan dengan ukuran yang lebih besar.

3.3 Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kekeringan di Kabupaten Sikka

a. Hambatan Internal.

Kekurangan pembiayaan untuk menyalurkan air bersih mendorong BPBD Kabupaten Sikka bekerja sama dengan pemerintah desa yang membutuhkan bantuan air bersih untuk mengumpulkan iuran yang digunakan sebagai biaya bahan bakar minyak kendaraan pengangkutan air. Menyikapi kekurangan sarana prasarana dalam penyaluran air, BPBD Kabupaten Sikka melakukan peminjaman kendaraan tangki air pada Organisasi Perangkat Daerah lain dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Sikka dengan tenggat waktu tertentu. Keterbatasan kompetensi pegawai dalam menyampaikan materi dan pelatihan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan kegiatan pegawai berikan pelatihan singkat mengenai hal-hal yang akan dilaksanakan pada suatu kegiatan.

b. Hambatan Eksternal.

Bagi daerah yang tidak dapat dilaksanakan penyaluran air secara langsung oleh kendaraan besar maka perlu dibantu dengan kendaraan dengan ukuran yang lebih kecil seperti mobil pick up atau kendaraan bermotor yang berisi tandon dan jerigen air bersih. Sedangkan untuk fasilitas masyarakat yang minim ketika air yang harusnya dialirkan menjadi untuk dusun tapi dusun tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk masyarakatnya sehingga penampungan air pribadi digunakan desa untuk sementara waktu.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Bencana alam kekeringan salah satu bencana yang terjadi secara perlahan-lahan dari waktu ke waktu karena memiliki tanda-tanda tertentu sesuai dengan perubahan iklim yaitu ketika tiba musim kemarau. Walaupun begitu, kekeringan seperti bencana yang dianggap sepele tetapi dampak memiliki dampak yang besar. Oleh karena itu, guna menyikapi hal tersebut pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan berbagai kegiatan penanggulangan bencana kekeringan seperti pada penelitian Suryapusita et al. (2022) dimana BPBD Kabupaten Bojonegoro melaksanakan mitigasi struktural dengan membangun beberapa proyek yang berguna untuk penyediaan air bagi masyarakat meliputi waduk, sumur bor, fasilitas pengelolaan air, geo membran, toren air, dan jaringan pipa air bersih juga melakukan mitigasi kepada masyarakat langsung melalui sosialisasi penanganan kekeringan dan mempromosikan konservasi air. Sedangkan di Kabupaten Sikka dilaksanakan mitigasi non-struktural diselenggarakan melalui kegiatan sosialisasi dan pembagian air bersih bagi daerah dengan indeks paling tinggi terdampak bencana kekeringan. Penentuan indeks terdampak bencana kekeringan melalui laporan kejadian bencana pada tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan ini dikaji menggunakan teori Manajemen oleh G.R. Terry yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Berbeda dari penelitian oleh Septiarum et al. (2023) yang menunjukkan bahwa manajemen mitigasi di Kabupaten Boyolali terhambat karena fungsi penggerakan tidak berjalan dengan baik, di Kabupaten Sikka menunjukkan program sosialisasi dan pembagian air bersih tidak berjalan dengan baik karena kegiatan pengawasan belum optimal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa manajemen mitigasi bencana kekeringan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka belum berjalan optimal

karena salah satu indikator manajemen pada tahap pengawasan (*controlling*) tidak dilaksanakan dengan baik. Penyebabnya adalah tidak ada pengamatan dan pengendalian pada penyelenggaraan kegiatan, serta evaluasi berjalan seadanya tanpa upaya lebih lanjut. Hal ini kemudian menyebabkan daerah tersebut selalu terdampak bencana kekeringan walaupun kegiatan mitigasi sudah dilaksanakan.

Faktor penghambat dalam penelitian ini terdiri dari hambatan internal yang meliputi anggaran yang minim, sarana prasarana yang kurang memadai, dan sumber daya manusia yang terbatas. Sedangkan hambatan eksternal meliputi kondisi geografis pemukiman warga dan kurangnya fasilitas pada masyarakat.

Oleh karena hambatan tersebut BPBD melaksanakan upaya mengatasi hambatan yang terdiri dari bekerja sama dengan pemerintah desa mengumpulkan dana pendukung penyaluran air bersih bagi desa yang membutuhkan, peminjaman kendaraan operasional ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Sikka, pembimbingan materi sosialisasi dan simulasi kepada pegawai untuk mendukung kualitas sebagai narasumber, menggunakan kendaraan mobil pick up dan kendaraan bermotor agar dapat mencapai daerah yang tidak bisa dijangkau mobil tangki air, dan bekerjasama dengan masyarakat desa menjadikan penampungan air pribadi dapat digunakan desa untuk sementara waktu.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan tertentu yang meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan penelitian yang hanya berlangsung selama dua minggu, sehingga penulis hanya bisa melaksanakan kegiatan wawancara dan dokumentasi. Observasi tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan mitigasi belum Kembali diselenggarakan BPBD Kabupaten Sikka.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Penulis menyadari bahwa perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap penanggulangan kekeringan masih sangat minim padahal berdampak cukup besar kepada sektor kehidupan lainnya. Untuk itu penulis berharap melalui penelitian ini membangun kesadaran akan perlunya perbaikan-perbaikan yang lebih terstruktur dan terencana dengan baik pada kegiatan mitigasi dikemudian hari dan sebagai acuan kepada pembaca untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait dengan penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditunjukkan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka dan Pemerintah Kabupaten Sikka beserta jajarannya yang telah mendukung penulis dengan memberikan ruang untuk melaksanakan penelitian sehingga penelitian berjalan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amanda, S. (2023). *Rencana Mitigasi Dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro Untuk Menangani Bencana Kekeringan*. *CHEMVIRO: Jurnal Kimia dan Ilmu Lingkungan (JKIL)*, 1(1), 12-16.

<https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/CHEMVIRO/article/view/560/414>

Andono, P. A. W., Warnandi, & Setianingsih, A. I. (2017). *Analisa Indeks Kekeringan Dengan Metode Standardized Precipitation Index (SPI) Dan Produktivitas*. *Jurnal SPATIAL Wahana*

- Bowo, T. A., Ingggris, J. S., & Belitung, U. B. (2023). *Peran LSM Dalam Penanggulangan Kekeringan dan Implikasinya Bagi Ketahanan Wilayah Di Kapanewon Nglipar Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pada Yayasan Wahana Mandiri Indonesia)*. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 108–120.
<https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/78982/36447>
- Dwilucky, B. A., & Wahyudi, K. E. (2024). *Penanggulangan Bencana Kekeringan di Kabupaten Bojonegoro dalam Perspektif Good Governance*. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(5), 2172-2181.
<https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/reslaj/article/view/1053/1224>
- Eviany, Eva dan Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat*. Jatinangor : PT. Nas Media Indonesia.
- Faqih, A., Jadmiko, S. D., & Apolinaris S. Geru. (2015). *Keragaman dan Perubahan Iklim di Nusa Tenggara Timur Analisis Kondisi Iklim Historis dan Proyeksi Perubahan Iklim di Kabupaten Manggarai, Sabu Raijua dan Sumba Timur* (In T. Widayati, A. Wibowo, & V. Andria (eds.)). Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.
<https://adaptasiklhk.id/cms/storage/files/monev/dokumenadaptasi/60793fd46dd36.pdf>
- Firdaus, D. N. (2023). *STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA ALAM KEKERINGAN DI KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR*.
http://eprints.ipdn.ac.id/12990/1/Dwiki%20N.%20Firdaus_30.0792_J5_STRATEGI%20BADAN%20PENANGGULANGAN%20BENCANA%20DAERAH%20DALAM%20MITIGASI%20BENCANA%20ALAM%20KEKERINGAN%20DI%20KABUPATEN%20SUMENEP%20PROVINSI%20JAWA%20TIMUR.pdf
- Neritarani, R. (2019). Identifikasi Dan Strategi Mitigasi Bencana Kekeringan Potensial Di Kabupaten Semarang. *Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 8(1), 72-84.
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/planomadani/article/view/7733/pdf_1
- Nurillah, S., Maulana, D., & Hasanah, B. (2022). *Manajemen Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon di Kecamatan Ciwandan*. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 334–350.
<https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JDKP/article/view/4613/2002>
- Septiarum, F., Maesaroh, & Widowati, Ni. (2023). *MANAJEMEN MITIGASI BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENANGGULANGI BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN BOYOLALI*.
<https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/14011>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suryapuspita, M., Setya Saputra, A., & Ayu Wulandari Ramdan, N. (2022). *Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Mitigasi Bencana Kekeringan Di Kabupaten Bojonegoro*. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/9088/pdf>
- Udori, A., & Miranti, M. (2019). *Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir*. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 1(2), 85–94.
<https://www.jpdpd.org/index.php/jpdpd/article/view/8/8>